Media Ekonomi Vol. 30 No. 1 April 2022 : 42 - 56 ISSN : 2442-9686 (online)
DOI: http://dx.doi.org/10.25105/me.v30i1.13397 ISSN : 0853-3970 (print)

DETERMINASI PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Mahdawi[1*], Rinaldi Rustam[2]
[12]Program Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti
Jl. Kyai Tapa No 1, Grogol, Jakarta 11440, Indonesia
*Coressponding Author Email: mahdawi1601@gmail.com

ABTRACT

Purpose : *This study aims to analyze the effect of Special Autonomy Fund, Regional Tax, Personnel Expenditure, Goods and Services Spending, and Human Development Index on Gross Regional Domestic Product of regency/municipality in Nanggroe Aceh Darussalam Province from 2015 to 2019.*

Design/Methodology /Approach : *This study used quantitative descriptive method. The research model used was an econometric model measured using panel data regression.*

Findings : *The results of panel data regression showed that the selected model is a fixed effect model. The results found that partially, only the variable of goods and services spending has no significant effect on gross regional domestic product. Meanwhile, the variables of special autonomy fund and personnel expenditure have a negative effect on gross regional domestic product. Meanwhile, regional tax and human development index have a positive significant effect on gross regional domestic product. The variables of special autonomy fund, local tax, personnel expenditure, goods and services spending, and human development index simultaneously have a significant effect on gross regional domestic product of regency/municipality in Nanggroe Aceh Darussalam Province.*

Keywords : *Gross Regional Domestic Product, Special Autonomy Fund, Regional Tax, Personnel Expenditure, Goods and Services Spending, Human Development Index, Panel Data, Fixed Effect Model.*

JEL Classification : E20, H71, O15

Submission date: 1 Maret 2021 *Accepted date: 21 Maret 2022*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi adalah proses meningkatnya kapasitas produksi yang kenaikannya dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan nasional (Meke dkk, 2018). Pertumbuhan ekonomi bisa dijelaskan sebagai proses metamorfosis keadaan ekonomi pada suatu wilayah/negara dengan menunjukkan kenaikan positif setiap periodenya (Jefri Alfin Sinaga et al., 2020). Pertumbuhan ekonomi bisa juga diinterpretasikan sebagai proses

meningkatnya produk domestik regional bruto (PDRB) pada harga yang konstan. Kenaikan atas barang dan jasa serta kemakmuran masyarakat menunjukkan jika perkembangan ekonomi telah berkembang ke arah yang positif (Irfani, 2018).

Produk domestik bruto (PDB) merupakan tolak ukur yang kerap kali dipakai untuk mengukur kerja ekonomi atau meningkatnya pertumbuhan ekonomi, bahwa PDB meringkas apakah ekonomi efektif dengan menggunakan suatu nilai mata uang tertentu dalam periode yang sudah ditentukan. Dalam hal ini, penilaian atas produk domestik bruto terbagi dua bagian yaitu PDB berdasarkan harga berlaku dan konstan. Dalam menghitung pertumbuhan ekonomi, PDB dipergunakan sebagai dasar harga konstan yang tidak mempertimbangkan pengaruh dari inflasi. Sementara mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah digunakan produk domestik regional bruto (PDRB). (Mankiw dalam Sulaeman & Silvia, 2019).

Perkembangan nilai produk domestik regional bruto (PDRB) kabupaten/kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selama periode tahun 2015-2019 dijelaskan dalam Gambar 1 berikut:

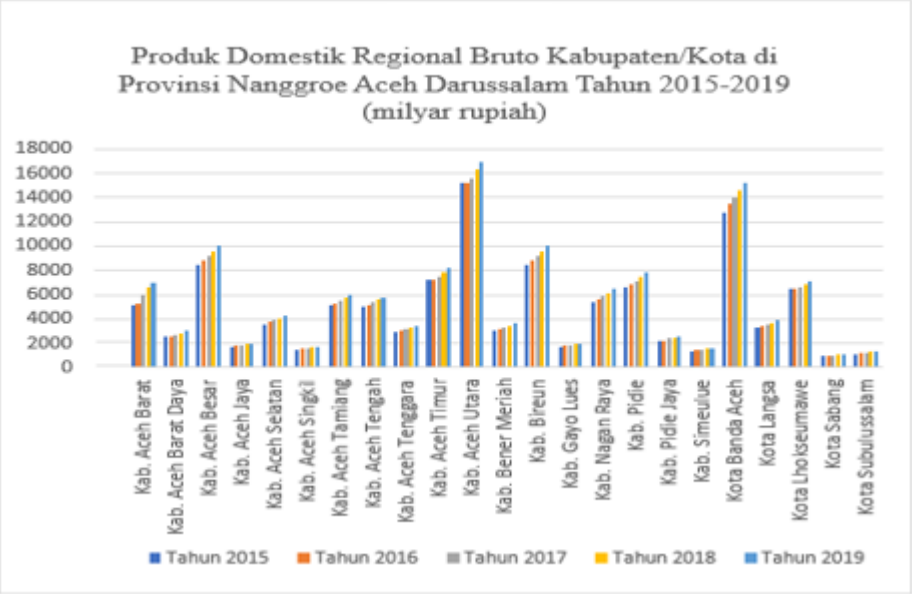

Sumber: Badan Pusat Statistik Nanggroe Aceh Darussalam 2015-2019

Gambar 1
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2015-2019 (milyar rupiah)

Produk domestik regional bruto pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selama periode 2015-2019 berdasarkan Gambar 1 diatas menjelaskan bahwa Kabupaten Aceh Utara memiliki produk domestik regional bruto (PDRB) paling besar selama periode penelitian yaitu sebesar 15184,78 milyar rupiah tahun 2015 hingga mencapai 16922,86 milyar rupiah tahun 2019, diikuti Kota Banda Aceh dengan produk domestik regional bruto sebesar 12724,95 milyar rupiah tahun 2015 hingga sebesar 15170,99 milyar rupiah tahun 2019, sedangkan produk domestik regional bruto terendah

dimiliki oleh Kota Sabang yaitu sebesar 912,00 milyar rupiah tahun 2015, dan hanya sebesar 1137,43 milyar rupiah tahun 2019. Sementara posisi kedua paling sedikit produk domestik bruto dimiliki oleh Kota Subulussalam dengan angka tidak melebihi 1358,69 milyar rupiah selama periode penelitian. Produk domestik regional bruto (PDRB) tentunya dapat dipengaruhi oleh besar kecilnya realisasi dan perkembangan jumlah dana otonomi khusus, pajak daerah, pengeluaran atas belanja pegawai dan belanja barang dan jasa serta indeks pembangunan manusia.

Produk domestik regional bruto merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di wilayah atau daerah dalam periode tertentu baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan (Syari et al., 2017). Pada tahun 2019, Nanngroe Aceh Darussalam mengalami peningkatan atas pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 4,20% atau naik 0,23% jika dibandingkan tahun 2009 (3,97). Pertumbuhan ekonomi tersebut masih dibawah rata-rata nasional, tetapi pertumbuhan ekonomi di daerah mengalami kenaikan yang positif. Penurunan jumlah penduduk dengan kelas ekonomi kelas menengah kebawah belum tentu searah dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Nanggroe Aceh Darussalam disebabkan pemerintah belum berhasil mencapai *output* yang tepat sasaran dalam merealisasikan anggaran.

Sebagai daerah yang diberikan dana otonomi khusus yang tidak didapatkan oleh daerah lain selain Papua dan Papua Barat, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam seyogyanya dapat menciptakan kemakmuran bagi rakyatnya. Sayangnya, berdasarkan BPS, (2021) bahwa Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera dan tertinggi ke 6 skala Nasional (dibawah rata-rata nasional) dengan persentase kemiskinan 15.43% di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atau 5.24% dibawah rata-rata nasional 10.19%.

Sejak pertama kali pemerintah pusat mengucurkan dana otonomi khusus (Otsus) kepada Pemerintah, Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam telah menerima sebanyak 64.5 triliun rupiah hingga tahun 2018. Menariknya transfer pemerintah untuk dana Otsus Aceh jumlahnya lebih besar setiap tahunnya yang tentunya disesuaikan dengan dana alokasi umum nasional. Artinya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki sumber daya keuangan yang kuat untuk menopang pertumbuhan ekonomi melalui penggunaan anggaran pada proyek yang tepat sararan. Penggunaan dana otsus dispesifikasikan untuk membiayai enam sektor pembangunan, yaitu perberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Sementara pajak merupakan sumber penerimaan terbesar daerah kabupaten/kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pajak daerah menurut Putri, (2013) adalah pajak yang dikutip oleh pemerintah dari individu/badan di tingkat daerah Kabupaten/Kota atau Provinsi yang digunakan untuk mendanai pembangunan di daerah dan ditetapkan dalam Peraturan-Peraturan Daerah.

Dari sisi pengeluaran, belanja pegawai dan belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran paling besar yang dilakukan sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Produk domestik regional bruto akan bergerak positif jika realisasi kedua variabel dari segi pengeluaran tersebut mencapai target yang ditentukan.

Selanjutnya Indeks Pembangunan Manusia juga merupakan sektor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dikarenakan kemakmuran masyarakat di suatu negara dapat diukur dengan besarnya angka pada Indeks pembangunan manusia (IPM). Semakin tinggi IPM suatu daerah, maka semakin tinggi kualitas sumber daya manusia (SDM) yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian terdahulu telah dilakukan terkait pengaruh dana otonomi khusus, pajak daerah, belanja pegawai dan belanja barang dan jasa serta indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi. Studi yang dilakukan oleh beberapa peneliti menyatakan dana otonomi khusus berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Pentury, 2020; Subroto, 2011; Iskandar, 2015). Pajak daerah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Irfani, 2018; Shafira, 2018; Sugiarti, 2016). Belanja pegawai mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Nurrahmah, 2016; Fitri dan Putri, 2019; Pangestu, 2019). Belanja barang dan jasa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Deswantoro et al., 2017; Yuniarti, 2020), dan indeks pembangunan manusia mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Sari et al., 2020)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengimplementasikan pengaruh dana otonomi khusus, pajak daerah, belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan indeks pembangunan manusia terhadap produk domestik regional bruto Kabupaten/Kota di Provinsi nanggroe Aceh Darussalam.

METODE PENELITIAN

Model yang digunakan untuk melihat variabel dependennya yakni Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dipengaruhi oleh variable independenya yakni Dana Otonomi Khusus (DOK), Pajak Daerah (PD), Belanja Pegawai (BP), Belanja Barang dan Jasa (BBJ) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan *panel data* dengan data diambil pada 18 Kabupaten dan 5 Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selama periode tahun 2015-2019.

Dalam estimasi data panel, *common effect model, fixed effect model dan random effect model* digunakan sehingga dapat menentukan model yang terbaik untuk analisis melalui uji chow dan uji hausman. Setelah terpilihnya model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini, maka uji t dan uji f serta R^2 dapat diinterpretasikan.

Dalam analisis metode data panel ini, maka model penelitian dapat di rumuskan sebagai berikut:

$$\mathbf{PDRB_{it} = \alpha_0 + \beta_1 DOK_{it} + \beta_2 PD_{it} + \beta_3 BP_{it} + \beta_4 BBJ_{it} + \beta_5 IPM_{it} + e_{it}}$$

Dimana:

$PDRB_{it}$ = Produk Domestik Regianal Bruto dalam milyar rupiah

DOK_{it} = Dana Otonomi Khusus dalam milyar rupiah

PD_{it} = Pajak Daerah dalam milyar rupiah

BP_{it} = Belanja Pegawai dalam milyar rupiah

BBJ_{it} = Belanja Barang dan Jasa dalam milyar rupiah

IPM_{it} = Indeks Pembangunan Manusia dalam skala 1-100

α_0 = Konstanta

β_1, β_2, β_3, β_4 dan β_5 = Koefisien (*coefficient*) regresi

e_{it} = Residual (error terms) R^2.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh dana otonomi khusus, pajak daerah, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan indeks pembangunan manusia (*independent variable*) terhadap produk domestik regional bruto (*dependent variable*) Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam akan dibahas dalam bagian ini dengan menggunakan estimasi panel data melalui bantuan program Evews 8.

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas data menggunakan nilai *Jarque-Bera Probability* dapat dilihat pada Gambar 2 sebagai berikut:

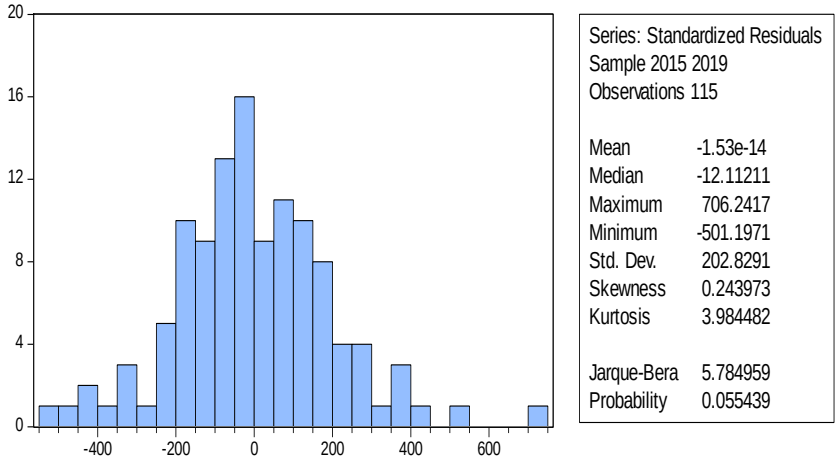

Sumber: Hasil Penelitian, data diolah menggunakan Eviews 8 (2021)

Gambar 2
Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan hasil pengujian sebagaimana ditujukkan pada Gambar 2 diatas ditemukan nilai probabilitas Jarque-Bera sebesar 0,055439 > 0,05, maka Ho dapat diterima, tolak Ha. Artinya data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Hasil Uji Chow

Hasil uji chow adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	186.036167	(22,87)	0.0000
Cross-section Chi-square	445.292595	22	0.0000

Sumber: Hasil Penelitian, data diolah menggunakan Eviews 8 (2021)

Berdasarkan Tabel 1 diatas, diketahui nilai probabilitas chi square adalah sebesar 0,0000 < alpha 0,05. Maka Ho tidak dapat diterima, terima Ha. Oleh karena itu, model yang cocok digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Selanjutnya dilakukan uji hausman.

Hasil Uji Hausman

Hasil uji hausman adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	108.908892	5	0.0000

Sumber: Hasil Penelitian, data diolah menggunakan Eviews 8 (2021)

Berdasarkan Uji Hausman Tabel 2 diatas, ditemukan nilai probalitas sebesar 0,0000 < alpha 0,05. Maka Ho tidak dapat diterima, terima Ha, sehingga model yang cocok digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Karena dalam uji chow terpilih *fixed effect mode*l dan uji hausman juga terpilih *fixed effect model*, maka kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan *fixed effect model* sebagai model terbaik untuk dianalisis.

Analisis Hasil Regresi Data Panel Dengan Model Terpilih *Fixed Effect Model*

Produk domestik regional bruto dipengaruhi oleh variabel dana otonomi khusus, pajak daerah, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan indeks pembangunan manusia. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan analisis data panel dengan model terpilih *fixed effect model*. Berdasarkan hasil estimasi terhadap variabel yang diteliti melalui bantuan program *Eviews 8* menunjukkan hanya variabel belanja barang dan jasa yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto, sementara empat variabel lainnya yang terdiri dari dana otonomi khusus, pajak daerah, belanja pegawai, dan indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada tahun 2015-2019. Lebih jelasnya hasil regresi data panel dalam penelitian ini dengan model terpilih fixed effect model dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Analisis Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	-10570.90	-5.247148	0.0000
DOK?	-2.788137	-2.201466	0.0303
PD?	24.03250	5.500421	0.0000
BP?	-2.748406	-3.194832	0.0019
BBJ?	-0.329914	-0.428931	0.6690
IPM?	244.2212	8.104890	0.0000
R-squared	= 0.997300		
F-statistic	= 1189.985		
Prob(F-statistic)	= 0.000000		

Sumber: Hasil Penelitian, data diolah menggunakan Eviews 8 (2021)

Variabel belanja barang dan jasa tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada periode tahun 2015-2019. Seharusnya setiap pengeluaran pemerintah untuk barang dan

jasa dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB). Peningkatan PDRB dapat meningkatkan persentase laju pertumbuhan PDRB yang positif dan juga dapat diartikan sebagai peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun hasil penelitian ini tidak menunjukkan pengaruh signifikan karena barang dan jasa yang di gunakan umumnya hanya bersifat jangka pendek sehingga barang dan jasa yang sama akan dibelanjakan kembali setiap tahunnya dan hal ini menjadi beban pembangunan berkelanjutan bagi daerah.

Sedangkan empat variabel lainnya seperti dana otonomi khusus, pajak daerah, belanja pegawai, dan indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada periode tahun 2015-2019. Dana otonomi khusus yang diberikan secara khusus kepada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mampu mempengaruhi produk domestik regional bruto sebagaimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan negatif terhadap produk domestik regional bruto. Pengaruh negatif dana otonomi khusus terhadap produk domestik regional bruto dapat disebabkan karena penggunaan dana otonomi khusus yang tidak efektif dan tidak tepat sasaran seperti diamanahkan oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh untuk membiayai enam sektor pembangunan, yaitu perberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Selain itu, peraturan pengelolaan dana otonomi khusus sering kali berubah- ubah, misalnya selama periode penelitian tahun 2015-2019 menggunakan tiga qanun tentang perubahan atas qanun Aceh nomor 2 tahun 2008 tentang tata cara pengalokasian tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan penggunaan dana otonomi khusus. Perubahan pertama yaitu qanun Aceh nomor 2 tahun 2013 yang menjadi rujukan pengalokasian dana otonomi khusus tahun 2015. Dalam qanun perubahan ini menjelaskan dana otonomi khusus 60% dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan Aceh sementara untuk kabupaten/kota sebesar 40%. Selanjutnya perubahan kedua, yaitu qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 digunakan sebagai pedoman pengalokasian untuk tahun 2016 dan tahun 2017. Tata kelola pengalokasiannya berbeda dengan qanun perubahan pertama yaitu terdapat kegiatan bersama provinsi Aceh dan kabupaten/kota, yang besarnya setiap tahun ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan setelah dikurangi untuk program bersama tersebut dialokasikan untuk program dan pembangunan Aceh dan paling banyak 40% dianggarkan untuk program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota dalam bentuk Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA). Perubahan ketiga yaitu Qanun Aceh Nomor 1 tahun 2018 yang menjadi pedoman pengalokasian dana otonomi khusus tahun 2018 dan 2019. Perubahan ketiga tersebut pengalokasiannya dilakukan dengan perimbangan untuk program dan kegiatan bersama pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dan setelah dikurangi untuk program tersebut, dana otonomi khusus dibagi paling sedikit sebesar 60% dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan Aceh dan paling banyak sebesar 40% dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota dalam bentuk DOKA. Perubahan Qanun tersebut digunakan sebagai dasar hukum bagi pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam dalam penyempurnaan tata kelola penggunaan dana otonomi khusus agar lebih tepat

sasaran dan mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat. Namun, hal tersebut dapat memberikan efek negatif dana otonomi khusus terhadap produk domestik regional bruto dikarenakan terjadinya perubahan-perubahan atas pengelolaan yang tidak konsisten dan pada akhirnya menyulitkan pembangunan berkelanjutan karena harus menyesuaikan dengan perubahan qanun atau peraturan-peraturan baru.

Selanjutnya, pajak daerah berpengaruh signifikan positif terhadap produk domestik regional bruto karena hasil penerimaan dari pajak daerah digunakan untuk pembangunan daerah yang dapat berfungsi untuk memudahkan akses masyarakat dalam aktivitas ekonomi misalnya pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya yang mendukung akselerasi pembangunan ekonomi.

Kemudian, variabel belanja pegawai memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap produk domestik regional bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada periode tahun 2015-2019. Belanja pegawai mempengaruhi produk domestik regional bruto secara negatif disebabkan pemerintah Kabupaten/Kota mampu membiayai pegawai dengan efisien sehingga terkesan pengeluaran yang dilakukan untuk belanja pegawai namun tidak dapat meningkatkan kinerja para pegawainya. Ketika kinerja pegawai pemerintah tidak dapat bekerja maksimal dengan kinerja yang baik, maka pengeluaran pemerintah untuk belanja pegawai dianggap tidak berfungsi dengan baik bahkan terjadi pemborosan atas belanjanya sehingga berdampak signifikan negatif terhadap produk domestik regional bruto.

Sementara indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan positif terhadap produk domestik regional bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada periode tahun 2015-2019. Hal ini disebabkan kualitas sumber daya manusia yang meningkat pada level tertentu sehingga adanya perkembangan terhadap indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia yang tinggi berarti masyarakat memiliki kecerdasan, pengetahuan, pendidikan dan kesehatan yang baik.

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 3 diatas, masing-masing model dapat diketahui bahwa fixed effect model merupakan estimasi terbaik dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$\mathbf{PDRB_{it} = -10570{,}90 - 2{,}788137\ DOK_{it} + 24{,}03250\ PD_{it} - 2{,}748406\ BP_{it} - 0{,}329914\ BBJ_{it} + 244{,}2212\ IPM_{it}}$$

Berdasarkan formulasi model diatas dengan tingkat error 5% pada setiap variable, maka diperoleh nilai konstanta (α_0) mempunyai koefisien sebesar -10570,90, artinya jika dana otonomi khusus, pajak daerah, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan indeks pembangunan manusia dianggap konstan, maka besarnya produk domestik regional bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada periode tahun 2015-2019 adalah sebesar -10570,90 satuan. Koefisien dana otonomi khusus sebesar -2,788137 yang berarti bahwa apabila dana otonomi khusus naik sebesar 1 satuan, maka produk domestik regional bruto akan mengalami penurunan sebesar 2,788137 satuan dengan asumsi variabel lain dianggap tetap. Koefisien pajak daerah sebesar 24,03250 yang berarti bahwa apabila pajak daerah naik sebesar 1 satuan, maka produk domestik regional bruto akan

mengalami peningkatan sebesar 24,03250 satuan dengan asumsi variabel lain dianggap tetap. Koefisien belanja pegawai sebesar -2,748406 yang berarti bahwa apabila belanja pegawai naik sebesar 1 satuan, maka produk domestik regional bruto akan mengalami penurunan sebesar 2,748406 satuan dengan asumsi variabel lain dianggap tetap. Koefisien belanja barang dan jasa sebesar -0,329914 yang berarti bahwa apabila belanja barang dan jasa naik sebesar 1 satuan, maka produk domestik regional bruto akan mengalami penurunan sebesar 0,329914 satuan dengan asumsi variabel lain dianggap tetap. Koefisien indeks pembangunan manusia sebesar 244,2214 yang berarti bahwa apabila indeks pembangunan manusia naik sebesar 1 satuan, maka produk domestik regional bruto akan mengalami peningkatan sebesar 244,2214 satuan dengan asumsi variabel lain dianggap tetap (konstan).

Selanjutnya pada nilai koefisien Kabupaten/Kota, terlihat bahwa Kabupaten Aceh Utara merupakan Kabupaten yang paling besar nilai koefisiennya yaitu sebesar 11940,69. Artinya Kabupaten Aceh Utara memberikan kontribusi positif terbesar terhadap produk domestik regional bruto Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada periode tahun 2015-2019. Hal ini disebabkan Kabupaten Aceh Utara mampu mengalokasikan pengeluarannya untuk meningkatkan produk domestik regional bruto dan dari segi kebijakan yang diambil tentu sudah dapat mendukung pembangunan daerahnya. Sementara Kota Sabang merupakan daerah yang memiliki nilai koefisien terbesar secara negatif terhadap produk domestik regional bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada periode tahun 2015-2019 dengan nilai koefisiennya sebesar -5770,220. Artinya Kota Sabang tidak mampu memberikan kontribusi positif terhadap produk domestik regional bruto Provinsi, namun sebaliknya Kota Sabang memberikan efek negative terhadap produk domestik regional bruto Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yaitu sebesar -5770,220. Hal ini terjadi disebabkan Kota Sabang memiliki nilai produk domestik regional bruto paling rendah selama periode penelitian dari tahun 2015 sampai tahun 2019 yaitu tidak lebih dari 1137,43. Jumlah yang sedikit tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah Kota Sabang tidak mampu membelanjakan pengeluarannya dengan baik sehingga produk domestik regional bruto daerah tidak dapat mencapai pertumbuhan positif atau dengan kata lain produk domestik regional bruto Kota Sabang tumbuh negatif.

Uji Koefisien Determinasi (R-*Squared*)

Hasil pengujian data panel dengan menggunakan *fixed effect model* diperoleh nilai R^2 (*R-squared*) sebesar 0,997300. Artinya, pengaruh dana otonomi khusus (DOK), pajak daerah (PD), belanja pegawai (BP), belanja barang dan jasa (BBJ), dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah sebesar 0,997300 atau 99,7%, sementara sisanya yaitu 0,3% dipengaruhi oleh variable-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Hasil Uji F (Uji Simultan)

Hasil pengujian pada tabel 3 menunjukkan bahwa nilai probabilitas F statistik sebesar 0,000000 < 0,05, maka variable dana otonomi khusus, pajak daerah, belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan indeks pembangunan manusia secara simultan berpengaruh

signifikan terhadap produk domestik regional bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada periode tahun 2015-2019.

Hasil Uji t (Uji Parsial)

Hasil pengujian parsial menunjukkan hasil sebagai berikut: 1) Nilai probabilitas dana otonomi khusus adalah sebesar 0,0303 < *alpha* 0,05, maka dapat disimpulkan hipotesa null ditolak. Artinya hipotesa pertama diterima, yaitu dana otonomi khusus (DOK) berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada periode tahun 2015-2019. 2) Nilai probabilitas pajak daerah adalah sebesar 0,0000 < *alpha* 0,05, maka dapat disimpulkan hipotesa null ditolak. Artinya hipotesa kedua diterima, yaitu pajak daerah (PD) berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada periode tahun 2015-2019. 3) Nilai probabilitas belanja pegawai adalah sebesar 0,0019 < *alpha* 0,05, maka dapat disimpulkan hipotesa null ditolak. Artinya hipotesa ketiga diterima, yaitu belanja pegawai (BP) berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada periode tahun 2015-2019. 4) Nilai probabilitas belanja barang dan jasa adalah sebesar 0,6690 > *alpha* 0,05, maka dapat disimpulkan hipotesa null gagal ditolak. Artinya hipotesa keempat ditolak, yaitu belanja barang dan jasa (BBJ) tidak berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada periode tahun 2015-2019. 5) Nilai probabilitas indeks pembangunan manusia adalah sebesar 0,0000 < *alpha* 0,05, maka dapat disimpulkan hipotesa null ditolak. Artinya hipotesa kelima diterima, yaitu indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada periode tahun 2015-2019.

Pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Hasil analisis menunjukkan nilai koefisien dana otonomi khusus dengan arah negatif yaitu -2,788137 dan nilai signifikan probabilitasnya 0,0303 < 0,05 sehingga menerima H_0 dan menolak H_1. Artinya, variable dana otonomi khusus berpengaruh signifikan negatif terhadap produk domestik regional bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada periode tahun 2015-2019. Pengaruh negatif dana otonomi khusus terhadap produk domestik regional bruto dapat disebabkan karena penggunaan dana otonomi khusus yang tidak efektif dan tidak tepat sasaran seperti diamanahkan oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh untuk membiayai enam sektor pembangunan, yaitu perberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sosial.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh tersebut juga menjelaskan Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Qanun Aceh ini juga digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan dana otonomi khusus di provinsi Aceh. Namun sering kali Qanun Aceh berubah-ubah, misalnya selama periode penelitian tahun 2015-2019 menggunakan tiga Qanun tentang perubahan atas Qanun

Aceh nomor 2 tahun 2008 tentang tata cara pengalokasian tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan penggunaan dana otonomi khusus. Perubahan pertama yaitu Qanun Aceh nomor 2 tahun 2013 yang menjadi rujukan pengalokasian dana otonomi khusus tahun 2015. Dalam Qanun perubahan ini menjelaskan dana otonomi khusus 60% dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan Aceh sementara untuk kabupaten/kota sebesar 40%. Selanjutnya perubahan kedua, yaitu Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 digunakan sebagai pedoman pengalokasian untuk tahun 2016 dan tahun 2017. Tata kelola pengalokasiannya berbeda dengan Qanun perubahan pertama yaitu terdapat kegiatan bersama provinsi Aceh dan kabupaten/kota, yang besarnya setiap tahun ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan setelah dikurangi untuk program bersama tersebut dialokasikan untuk program dan pembangunan Aceh dan paling banyak 40% dianggarkan untuk program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota dalam bentuk Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA). Perubahan ketiga yaitu Qanun Aceh Nomor 1 tahun 2018 yang menjadi pedoman pengalokasian dana otonomi khusus tahun 2018 dan 2019. Perubahan ketiga tersebut pengalokasiannya dilakukan dengan perimbangan untuk program dan kegiatan bersama pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dan setelah dikurangi untuk program tersebut, dana otonomi khusus dibagi paling sedikit sebesar 60% dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan Aceh dan paling banyak sebesar 40% dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota dalam bentuk DOKA.

Perubahan Qanun tersebut digunakan sebagai dasar hukum bagi pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam dalam penyempurnaan tata kelola penggunaan dana otonomi khusus agar lebih tepat sasaran dan mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat. Namun, hal tersebut dapat memberikan efek negatif dana otonomi khusus terhadap produk domestik regional bruto dikarenakan terjadinya perubahan-perubahan atas pengelolaan yang tidak konsisten dan pada akhirnya menyulitkan pembangunan berkelanjutan karena harus menyesuaikan dengan perubahan Qanun atau peraturan-peraturan baru. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan, maka hipotesis dalam penelitian ini ditolak. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Rosita et al., 2018) bahwa dana otonomi khusus berpengaruh signifikan positif terhadap produk domestik regional bruto (PDRB).

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Hasil analisis menunjukkan nilai koefisien pajak daerah dengan arah positif yaitu 24,03250 dan nilai signifikan probabilitasnya 0,0000 < 0,05 sehingga menolak H_0 dan menerima H_2. Artinya, variable pajak daerah berpengaruh signifikan positif terhadap produk domestik regional bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada periode tahun 2015-2019. Oleh karena itu, hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan, maka hipotesis dalam penelitian ini diterima. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Mutiara, 2015) bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan positif terhadap produk domestik regional bruto (PDRB).

Penerimaan pajak daerah di Nanggroe Aceh Darussalam sangat besar diperoleh dari pajak hotel dan pajak restoran. Pajak hotel berasal dari jasa atas penyediaan penginapan yang

dikenakan pajak baik penginapan bagi wisatawan maupun untuk penggunaan pada aktifitas-aktifitas yang dilakukan masyarakat umum bahkan di daerah Aceh terdapat banyak lokasi wisata yang dapat dikunjungi dan juga menjadi satu-satunya daerah yang menerapkan syariat Islam melalui Qanun. Oleh karenanya, pajak dari penggunaan hotel berdampak bagi penerimaan daerah yang pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, pajak restoran juga dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap penerimaan daerah yang dapat mendongkrak perekonomian daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kota Banda Aceh misalnya, banyak sekali restoran yang menyajikan makanan dan minuman. Karena masyarakat Aceh sangat mencintai kuliner dan makanan restoran sehingga terjadi pembelian atas makanan dan minuman tersebut, maka penerimaan pajak daerah dari pajak restoran memiliki pengaruh yang besar.

Pengaruh Belanja Pegawai Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Hasil analisis menunjukkan nilai koefisien belanja pegawai dengan arah negatif yaitu -2,748406 dan nilai signifikan probabilitasnya 0,0019 < 0,05 sehingga menerima H_0 dan menolak H_3. Artinya, variable belanja pegawai berpengaruh signifikan negatif terhadap produk domestik regional bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada periode tahun 2015-2019. Belanja pegawai memiliki dampak negatif terhadap produk domestik regional bruto disebabkan oleh belanja yang dilakukan pemerintah untuk membayar upah pegawai, tunjangan dan sebagainya cukup besar dan menjadi belanja rutin yang harus dikeluarkan oleh pemerintah, namun pegawai atau sumber daya manusia yang menerima gaji tersebut dapat dikatakan belum mampu bekerja maksimal dan meningkatkan kualitasnya sehingga hal ini menjadi pengeluaran pemerintah yang dapat dianggap tidak produktif (pemborosan). Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan, maka hipotesis dalam penelitian ditolak. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Ayu (2020) bahwa belanja pegawai berpengaruh signifikan positif terhadap produk domestik regional bruto (PDRB).

Pengaruh Belanja Barang dan Jasa Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Hasil analisis menunjukkan nilai koefisien belanja barang dan jasa dengan arah negatif yaitu -0,329914 dan nilai signifikan probabilitasnya 0,6690 > 0,05 sehingga menerima H_0 dan menolak H_4. Artinya, variable belanja barang dan jasa tidak berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada periode tahun 2015-2019. Alasan belanja barang dan jasa memiliki pengaruh negatif terhadap produk domestik regional bruto adalah belanja pemerintah atas barang dan jasa seperti belanja keperluan perkantoran dan sewa gedung yang terkadang dilakukan tahunan, namun gedung yang disewa tersebut jarang dimanfaatkan setiap hari sehingga kesannya realisasi anggaran tersebut menjadi tidak efisien, bahkan hanya digunakan pada hari-hari tertentu. Hal ini menjadi pengeluaran yang tidak tepat sasaran dan tentu akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Harusnya penyewaan gedung dilakukan pada saat diperlukan saja pada waktu tertentu sehingga dapat menghemat belanja daerah. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan, maka hipotesis dalam penelitian ditolak. Penelitian ini tidak

sejalan dengan penelitian Prayogo (2019) bahwa belanja barang dan jasa berpengaruh terhadap produk domestik regional bruto (PDRB).

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Hasil analisis menunjukkan nilai koefisien indeks pembangunan manusia dengan arah positif yaitu 244,2212 dan nilai signifikan probabilitasnya 0,0000 < 0,05 sehingga menolak H_0 dan menerima H_5. Artinya, indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan positif terhadap produk domestik regional bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada periode tahun 2015-2019. Oleh karena itu, hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan, maka hipotesis dalam penelitian diterima. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Mulyasari, 2018) dengan hasil penelitiannya indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan positif terhadap produk domestik regional bruto (PDRB).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan model terpilih yaitu *fixed effect model*, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dana otonomi khusus dan belanja pegawai berpengaruh signifikan negatif terhadap produk domestik regional bruto. Sedangkan pajak daerah dan indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan positif terhadap terhadap produk domestik regional bruto. Sementara belanja barang dan jasa tidak berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada periode tahun 2015-2019.

Saran

Penelitian ini tentu memiliki keterbatasan yang memerlukan penyempurnaan untuk digunakan oleh peneliti selanjutnya. Beberapa saran untuk penelitian selanjutnya diantaranya adalah: 1) Para peneliti berikutnya diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel lain yang mungkin memiliki pengaruhnya terhadap produk domestik regional bruto sehingga hasil penelitiannya lebih akurat. 2) Sebaiknya pemerintah memaksimalkan realisasi penerimaan daerah yang bersumber dari pajak sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia melalui program pendidikan gratis, kesehatan dan meningkatkan standar hidup yang layak bagi masyarakat. 3) Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan jumlah tahun observasinya dan menggunakan data tahun penelitian yang lebih *update*, agar datanya lebih dekat dengan tahun penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Ayu, M. (2020). *Pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2018*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Badan Pusat Statistik. Aceh Dalam Angka 2015-2021.

Deswantoro, D. B., Ismail, A., & Hendarmin, H. (2017). Pengaruh Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 - 2015. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, *6*(3), 187. https://doi.org/10.26418/jebik.v6i3.23256

Fitri, N., & Putri, S. (2019). Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kawasan Barat Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi, 3(1),* 34-41.

Irfani, N. (2018). *Pengaruh Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Karawang Tahun 2012-2016.* Diploma thesis. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Iskandar, M. G. R. (2015). *Pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh Tahun 2008-2012*. Skripsi. FEB UNPAD.

Jefri Alfin Sinaga, Elidawaty Purba, & Pawer Darasa Panjaitan. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekuilnomi*, *2*(1), 40–48. https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v2i1.350

Meke, C. S. E., Sofilda, E., & Entaresmen, A. (2018). Determinasi Belanja Modal di Wilayah Indonesia Timur Tahun 2012-2016. *Seminar Nasional Cendekiawan ke 4 tahun 2018*. Buku 2: Hukum, Politik, Manajemen, Ekonomi, Akuntansi, Konseling, Desain dan Seni Rupa.

Mulyasari, A. (2018). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Angkatan Kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto. *Economics Development Analysis Journal*, *5*(4), 368–376. https://doi.org/10.15294/edaj.v5i4.22174

Mutiara, D. J. (2015). Pajak Daerah Dan Pengaruhnya Terhadap PDRB di Propinsi Kalimantan Timur. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, *4*(1). https://doi.org/10.15408/sjie.v4i1.2296

Nurrahmah, R. R. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Pada Pemerintah Kab/kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2013). *Jurnal Elektronik Tugas Akhir Mahasiswa FE-UMRAH*. Diakses pada 27 Juli 2021 melalui website http://jurnal.umrah.ac.id/archives/5479.

Pangestu, E. C. (2019). Pengaruh Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, Belanja Pegawai dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jiep: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, *1*(1). https://doi.org/10.20527/Jiep.v1i1.1113

Pentury, M. A. (2020). Effect of Balancing Funds and Special Autonomy Funds on Economic Growth in West Papua Province (Capital Expenditure as An Interveining Variable). *Eko-Regional, 15 (2).* 32-43.

Prayogo, P. A. (2019). *Pengaruh Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pegawai dan Belanja Modal Terhadap PDRB di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017*. Skripsi. FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran. Yogyakarta.

Putri, S. A. E. (2013). *Sistem Pemungutan Pajak Daerah dalam era Otonomi Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Kuningan*. Tesis. Magister Ilmu Hukum Universitas Pasundan. Bandung.

Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.

Rosita, A., Anwar, D., Faisal Abdullah, M., & Hadi, S. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Otonomi Khusus Dan Belanja Modal Terhadap PDRB di Kab/Kota Provinsi Papua. *Jurnal Ilmu Ekonomi,* V(2).

Sari, Y., Nasrun, A., & Putri, A. K. (2020). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2017. *Equity: Jurnal Ekonomi*, *8*(1), 1–13. https://doi.org /10.33019/Equity.v8i1 .9

Shafira, P. V. (2018). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2016*. Skripsi. FEB-Universitas Sumatera Utara. Medan.

Subroto, H. (2011). *Pengaruh Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua*. Doctor thesis, Universitas Brawijaya.

Sugiarti, D. (2016). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah dan Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Demak Tahun 2005-2015.* MIPA-UNNES. Semarang.

Sulaeman, A. S., & Silvia, V. (2019). Pendapatan Asli Daerah, Transfer Daerah, dan Belanja Modal, Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, *4*(1), 97–112. https://doi.org/10. 29303/Jaa.v4i1.61

Syari, D. D., Syamsurijal, S., & Robiani, B. (2017). The Effect of Fiscal Decentralization to Gross Domestic Regional Product of District / City in South Sumatra Province. *Sriwijaya International Journal of Dynamic Economics and Business*, *1*(2), 181. https://doi.org/10 .29259/Sijdeb.v1 i2.181-202

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (UUPA).

Yuniarti. (2020). Pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal terhadap Pengangguran yang diinterveining oleh Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Pembangunan dan Pemerataan*, 9(2). https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcc/article/view/42135.